

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Siti Khadijah¹, Reno Affrian², Selamat Riadi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: sitiujahujah8495@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan memiliki dua dimensi, yakni sebagai proses dan sebagai tujuan akhir. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan mencakup rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. UMKM memainkan peranan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan permodalan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta akses pasar yang terbatas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengidentifikasi empat strategi utama dalam pemberdayaan UMKM, yaitu: penguatan pemasaran, pengembangan kapasitas SDM, penataan dan pengawasan usaha, serta peningkatan kemampuan finansial. Walaupun terdapat inisiatif dari pemerintah daerah, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Strategi, Lampihong

ABSTRACT

Empowerment encompasses two key dimensions: it functions both as a process and as an ultimate goal. As a process, empowerment involves a series of activities aimed at enhancing the capacity and self-reliance of underprivileged community groups. This study aims to evaluate the empowerment efforts directed toward Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lampihong District, Balangan Regency. MSMEs play a crucial role in driving the local economy, although they continue to face various challenges, including limited access to capital, inadequate human resource capacity, and restricted market reach. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through field observations, interviews, and documentation. The findings identify four key strategies for empowering MSMEs: strengthening marketing, developing human resources, regulating and supervising businesses, and improving financial capacity. Despite initiatives taken by the local government, implementation of these strategies still faces several obstacles. Therefore, cross-sector collaboration is essential to support sustainable MSME empowerment.

Keywords: Empowerment, MSMEs, Strategy, Lampihong

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudriamunawar (2012), pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju arah yang lebih maju dan membutuhkan dukungan dari berbagai aspek secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi elemen krusial, mengingat keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Kesejahteraan masyarakat suatu daerah sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi. Sukirno (1996) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi mencakup upaya peningkatan pendapatan per kapita melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang tersedia, termasuk investasi, teknologi, dan peningkatan keterampilan serta manajemen. UMKM memiliki peranan penting dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Keberadaannya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Lampihong menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Masing-masing memiliki karakteristik dan batasan yang ditentukan berdasarkan aset dan omset tahunan. Di Kecamatan Lampihong, keberadaan UMKM sangat beragam, mencakup sektor kuliner, kerajinan, hingga pertanian. Namun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya kemampuan manajerial, serta akses pasar yang belum optimal.

Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2019 telah menetapkan kebijakan untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara terpadu dan berkelanjutan. Meskipun begitu, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan informasi, kurangnya pelatihan, dan minimnya pendampingan teknis. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana upaya pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) disusun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan dinamis, berdasarkan ekonomi kerakyatan serta pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Balangan memiliki berbagai potensi bahan dasar yang dapat menunjang masyarakat dalam menjalankan usaha mikro yang berkesinambungan.

Hasil observasi maka dengan ini dapat diketahui bahwa ada beberapa fenomena masalah pada Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Sebagai berikut:

1. Kurangnya Permodalan: Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan

UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari sisi pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

2. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas: Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap management pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha: Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
4. Minimnya keterampilan dalam pemasaran produk: Dalam pemasaran produk menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM karena sebagian besar dari mereka belum memahami konsep dasar pemasaran seperti segmentasi pasar, penentuan target, konsumen, hingga strategi promosi yang tepat. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital juga memperburuk situasi, dimana mereka belum mampu mengelola akun sosial media, membuat konten promosi yang menarik, atau menggunakan marketplace secara optimal untuk meningkatkan penjualan.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Lampihong menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam mengakses modal, Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, dan Terbatasnya sarana dan prasarana, serta usaha minimnya keterampilan dalam pemasaran produk. Hal ini menyebabkan banyak usaha yang tidak dapat berkembang secara optimal, bahkan terpaksa tutup. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam hal pelatihan dan pendampingan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pemberdayaan tersebut. Melihat uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dan menyusunnya dalam bentuk penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Lampihong. Penelitian deskriptif kualitatif

digunakan untuk menggali informasi berdasarkan kenyataan di lapangan dan menginterpretasikan data sesuai konteksnya.

Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data merupakan komponen krusial dalam penelitian, karena data merupakan dasar utama untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik observasi langsung ke lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan dokumentasi terhadap berbagai dokumen atau catatan kegiatan yang relevan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki informasi penting terkait pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari pelaku UMKM dan perwakilan pemerintah daerah yang terlibat dalam program pemberdayaan.

Desain operasional penelitian ini mengacu pada konsep strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sjaifudin (1995), yang mencakup empat pilar utama: pengembangan pemasaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengaturan dan pengendalian usaha, serta penguatan kemampuan finansial pelaku UMKM.

Dalam hal analisis data, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup empat tahapan utama: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin uji krebilitas data, digunakan beberapa teknik seperti triangulasi sumber, perpanjangan waktu observasi, member checking, audit trail, dan penggunaan bahan referensi sebagai pembanding.

PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil. Menengah (UMKM) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

1. Pengembangan Pemasaran

Pengembangan pemasaran adalah upaya membuka peluang pasar seluas-luasnya bagi produk UMKM agar dikenal, diminati, dan mampu bersaing, melalui peningkatan akses pasar, kualitas produk, informasi pasar, serta kerja sama dalam distribusi dan promosi.

a. Cara Promosi Produk

Cara promosi produk adalah upaya untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap suatu produk.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun sudah terdapat kesadaran dari pelaku UMKM akan pentingnya promosi, namun implementasinya masih terbatas dan belum optimal. Banyak pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai strategi promosi yang efektif, serta belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar.

b. Penggunaan Media Digital

Penggunaan media digital termasuk dalam strategi pengembangan pemasaran, yaitu membantu para pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, mempromosikan produk secara online, dan meningkatkan daya saing melalui platform seperti media sosial dan marketplace.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media digital oleh pelaku UMKM di Kecamatan Lampihong masih berada pada tahap awal dan belum maksimal. Meskipun ada upaya dari beberapa pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial, namun keterbatasan pengetahuan dan minimnya pendampingan menyebabkan upaya tersebut belum efektif dalam meningkatkan penjualan secara signifikan.

c. Keikutsertaan Dalam Promosi

Keikutsertaan Dalam Promosi seperti mengikuti pameran, bazar, atau expo. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk UMKM ke masyarakat luas, membuka peluang kerja sama, dan memperluas pasar secara langsung melalui interaksi dengan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keikutsertaan pelaku UMKM dalam kegiatan promosi masih rendah dan belum terencana secara baik. Kegiatan promosi hanya dilakukan jika ada kesempatan yang datang dari luar, bukan karena kesadaran internal pelaku usaha akan pentingnya memperluas jangkauan pasar.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pelaku UMKM melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan pendidikan.

a. Pencatatan Keuangan

Pencatatan keuangan adalah kegiatan mencatat semua transaksi keuangan usaha, seperti pemasukan, pengeluaran, modal, dan laba secara teratur dan rapi, agar pelaku usaha bisa mengetahui kondisi keuangan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Lampihong.

b. Pengelolaan Produksi atau Stok

Pengelolaan produksi atau stok adalah proses mengatur jumlah barang yang diproduksi dan disimpan agar sesuai dengan kebutuhan pasar, agar tidak terjadi kelebihan (*overstock*) atau kekurangan barang, serta memastikan kualitas dan ketersediaan

produk tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaannya belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara menyeluruh. Perlu adanya program pelatihan yang lebih intensif, berkelanjutan, dan terstruktur, serta pendekatan yang lebih personal agar setiap pelaku UMKM dapat mengembangkan kapasitas dirinya sesuai dengan kebutuhan usaha.

3. Strategi Pengaturan dan Pengendalian

Strategi Pengaturan dan Pengendalian adalah upaya untuk menciptakan manajemen usaha yang tertib dan terarah. Ini mencakup pengelolaan operasional, pengawasan kegiatan usaha, pencatatan administrasi, serta penentuan standar kerja agar UMKM bisa berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

a. Perencanaan Usaha

Perencanaan usaha adalah proses menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Lampihong belum memiliki perencanaan usaha yang tertulis dan sistematis. Sebagian besar hanya mendiskusikannya secara lisan saat pertemuan kelompok, dan pengawasan usaha dilakukan secara sederhana.

b. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha adalah proses memantau dan mengevaluasi jalannya usaha agar tetap sesuai dengan rencana dan tujuan. Ini mencakup mengontrol kualitas produk, mengecek keuangan, mengatur stok, dan memastikan semua kegiatan berjalan efisien serta tidak menyimpang dari target usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi pengaturan dan pengendalian usaha masih terbatas dan belum terstruktur. Usaha dijalankan berdasarkan kebiasaan tanpa evaluasi yang jelas.

4. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial

Strategi peningkatan kemampuan finansial adalah upaya untuk memperkuat kondisi keuangan UMKM melalui akses permodalan, bantuan dana, pelatihan pengelolaan keuangan, serta pencatatan dan perencanaan yang baik.

a. Akses Ke Pembiayaan

Akses ke pembiayaan adalah kemampuan pelaku UMKM untuk mendapatkan sumber dana atau modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Lampihong belum mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal maupun program bantuan pemerintah. Sebagian besar masih mengandalkan modal pribadi karena belum memahami prosedur pengajuan bantuan atau merasa khawatir dengan risiko pinjaman.

b. Kendala mendapatkan dana

Kendala mendapatkan dana bagi pelaku UMKM meliputi kurangnya informasi tentang program bantuan, sulitnya persyaratan administrasi, tidak memiliki jaminan, rendahnya literasi keuangan, serta rasa takut terhadap resiko pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah. Tidak banyak pelaku usaha yang mengetahui adanya program bantuan modal dari pemerintah, dan pencatatan keuangan usaha pun masih dilakukan secara manual, bahkan ada yang hanya mengandalkan ingatan.

c. Kemampuan mengelola keuangan usaha

Kemampuan mengelola keuangan usaha adalah kemampuan pelaku usaha untuk mencatat, mengatur, dan mengendalikan arus masuk dan keluar uang secara teratur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi peningkatan kemampuan finansial masih belum berjalan optimal. Pelaku UMKM membutuhkan pelatihan dan pendampingan agar mampu mengakses permodalan secara mandiri dan mengelola keuangan usaha dengan lebih baik.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yaitu:

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong adalah segala hal yang mendukung atau mendorong suatu usaha atau program supaya bisa berkembang dan berjalan dengan baik.

a. Kepedulian Pemerintah Daerah Terhadap UMKM

Pemerintah Kabupaten Balangan, melalui Dinas Koperasi ,UKM, dan Tenaga Kerja Kab.Balangan yang aktif memfasilitasi pelaku UMKM dalam bentuk pelatihan, pameran produk lokal, dan pemberian bantuan usaha.

b. Ketersediaan Bahan Baku Lokal yang Mendukung Usaha
Bahan baku seperti purun ,nira (olahan gula merah) dan bahan alami lainnya mudah didapatkan di lingkungan sekitar, sehingga mendukung keberlangsungan usaha kerajinan dan produksi lokal.

c. Semangat dan Kemandirian Pelaku UMKM

Para pelaku usaha menunjukkan semangat tinggi dalam mengembangkan usahanya secara mandiri, meskipun masih terbatas dari sisi kemampuan teknologi dan manajemen.

2. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat adalah segala sesuatu yang jadi kendala atau penghambat dalam menjalankan atau mengembangkan sebuah usaha atau program.

a. Rendahnya Literasi Digital dan Teknologi

Banyak pelaku UMKM belum memahami pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan manajemen usaha, sehingga sulit bersaing di pasar modern.

b. Keterbatasan Akses Permodalan

Meskipun ada program bantuan modal, banyak pelaku UMKM kesulitan mengaksesnya karena tidak memiliki dokumen administrasi yang lengkap atau jaminan.

c. Kurangnya Pelatihan Lanjutan dan Pendampingan Usaha

Program pelatihan yang diberikan pemerintah masih bersifat umum dan belum berkelanjutan. Pendampingan intensif juga belum merata ke semua desa.

d. Minimnya Jaringan Distribusi dan Pemasaran Produk

Produk UMKM masih sulit masuk ke pasar yang lebih luas karena keterbatasan jaringan distribusi dan kurangnya strategi pemasaran yang efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan UMKM di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, maka dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan empat indikator sebagai berikut:

1. Pengembangan Pemasaran, menunjukkan hasil yang cukup baik. Beberapa pelaku UMKM telah memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk dan mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun, penggunaan digital marketing secara menyeluruh belum merata, dan sebagian pelaku masih kurang memahami strategi promosi yang efektif.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, belum berjalan optimal. Pemerintah daerah telah mengadakan pelatihan keterampilan seperti membuat sasirangan dan anyaman purun, tetapi pelatihan manajemen usaha dan pemasaran modern masih sangat terbatas. Selain itu, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan secara berkelanjutan.

3. Pengaturan dan Pengendalian Usaha, belum dilaksanakan dengan maksimal. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki perencanaan usaha yang jelas dan sistem pencatatan keuangan yang memadai. Pemerintah belum melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya usaha UMKM di tingkat desa.
4. Peningkatan Kemampuan Finansial, menjadi tantangan terbesar dalam pemberdayaan UMKM. Meskipun ada program bantuan dan akses ke permodalan, pelaku UMKM masih mengalami kendala administratif dan informasi terkait pembiayaan. Akibatnya, sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi dan belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM di Kecamatan Lampihong masih berada dalam tahap pengembangan dan belum menunjukkan efektivitas yang maksimal. Perlu upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah, pendampingan intensif, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan UMKM yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Sjaifudin. (1995). *Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah*. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.



Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.